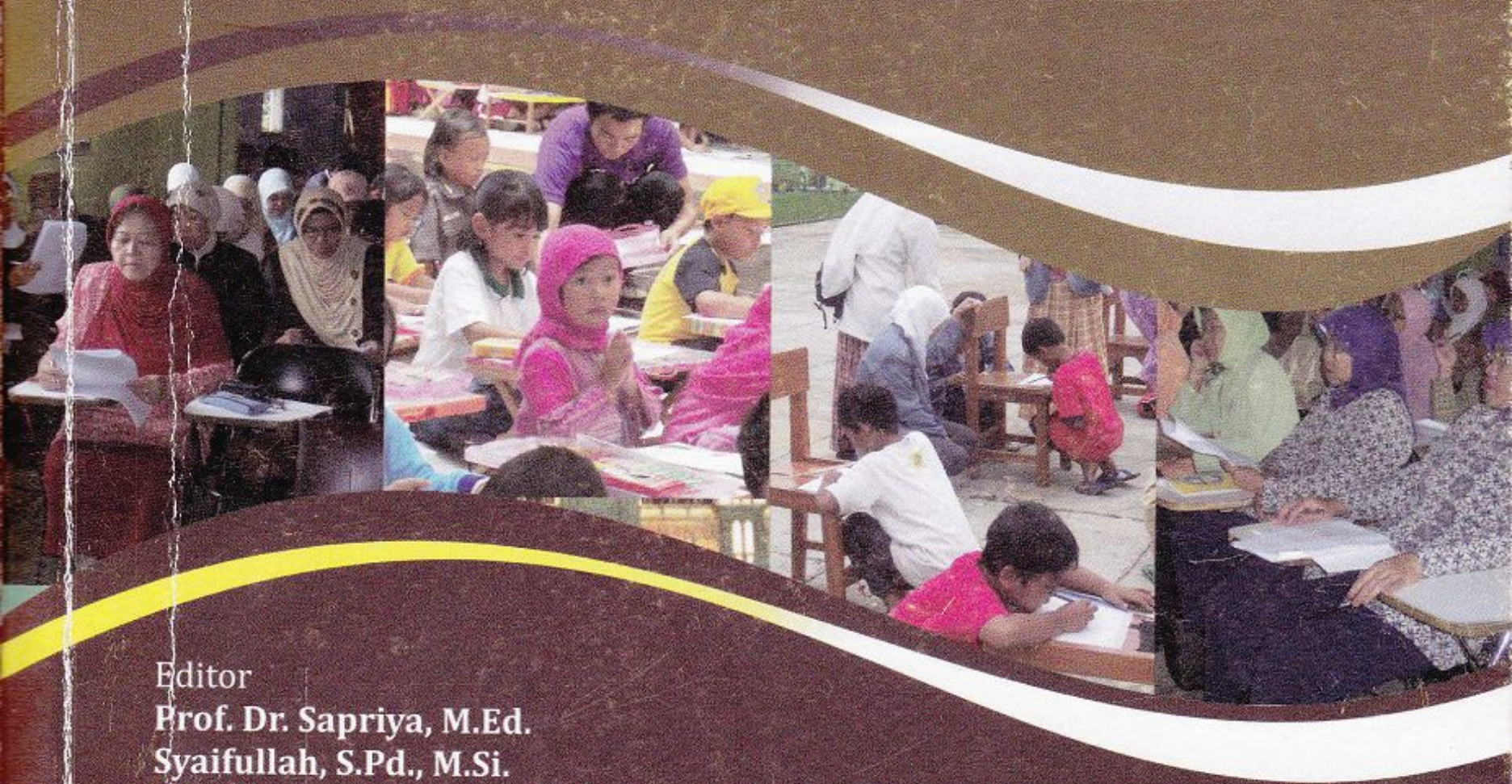


REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA & IMPLEMENTASI KURIKULUM PKN 2013



Editor
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.
Syaifullah, S.Pd., M.Si.
Leni Anggraeni, S.Pd., M.Pd.
Candra Cuga, S.Pd., M.Pd.



Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Indonesia

Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Implementasi Kurikulum PKn tahun 2013

Editor

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.

Syaifullah, S.Pd., M.Si.

Leni Anggraeni, S.Pd., M.Pd.

Candra Cuga, S.Pd., M.Pd.



**Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Indonesia**

SEMINAR NASIONAL REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
DAN KURIKULUM PKN 2013
Bandung, 14 Desember 2013
di Auditorium Lt 6 FPIPS
Universitas Pendidikan Indonesia

ISBN: 978-602-8418-26-3

Editor Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.
Syaifulloh, S.Pd., M.Si.
Leni Anggraeni, S.Pd., M.Pd.
Candra Cuga, S.Pd., M.Pd.

Cetakan I : Desember 2013

Penerbit:

Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Phone: 62.22.2013163 Ext. 2512

***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta***

Pasal 72:

- 1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).*
- 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	iii
Sambutan	v
 PENANAMAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN MELALUI KURIKULUM 2013 Prof. Dr. Idrus Affandi, SH	 1
 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Prof. Dr. Drs.H. Astim Riyanto, SH, MH.....	 9
 KURIKULUM 2013 PERKUAT PEMBANGUNAN KARAKTER BERBASIS PANCASILA Leni Anggraeni, S.Pd., M.Pd.”	 19
 KURIKULUM 2013 SEBAGAI WAHANA EKSISTENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MENJADI <i>HIGH STATUS OBJECT</i> ” Dr. M. Yahya Arwiyah, SH.MH. “.....	 27
 KURIKULUM 2013 PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK” Dr. Prayoga Bestari, M.Si. “	 32
 PERAN PKN DALAM ERA KURIKULUM 2013 Susan Fitriasari, S.Pd., M.Pd. “	 40
 ANALISIS PERBANDINGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DENGAN KURIKULUM 2013 Dwi Heryanto, M.Pd.....	 48
 PELUANG BAGI GURU DALAM MENGINTERNALISASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SESUAI TUNTUTAN KURIKULUM 2013 Dr. Asep Mahpudz, M.Si.....	 60
 KESIAPAN GURU DALAM MENGHADAPI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Dr. Asep Priatna, M.Pd.....	 68
 REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMUPUK SIKAP NASIONALISME GENERASI MUDA Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si	 76

PERUBAHAN KURIKULUM MEMBAWA GENERASI LEBIH UNGGUL Dra. Atiek Rohmiyati, M.Pd.....	84
MENGHIDUPKAN KEMBALI NILAI-NILAI PANCASILA DAN IMPLIKASINYA DALAM KURIKULUM 2013 Baiq Nika Kumalasari.....	90
PENDEKATAN STUDENT ACTIVE LEARNING PADA MATA KULIAH PANCASILA UNTUK MEMBENTUK KARAKTER WARGA NEGARA YANG BAIK SEBAGAI BAGIAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA Dian Agus Ruchliyadi	99
MEMBINGKAI KE-BHINNEKA TUNGGAL IKA-AN DALAM PERSPEKTIF MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd	108
KONTINUITAS PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN KEJURUAN Drs. H. Kondar Siregar, M.A.....	123
PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM MENGAKTUALISASIKAN NILAI- NILAI PANCASILA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN KEKERASAN MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI H. Rivai Mana dan Candra C.....	132
PENGEMBANGAN MODEL PEMBINAAN KARAKTER KEPATUHAN TERHADAP NORMA KETERTIBAN DALAM MATA PELAJARAN PKn DI SMP NEGERI BANJARMASIN Sarbaini dan Fatimah.....	146
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA PADA KURIKULUM 2013 MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP Purnomo Ananto.....	159
REVITALISASI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DALAM MEMPERKOKOH DAN MEMPERKUAT 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA Sabarudin, S.P., M.Pd.....	174
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN VISIONER DAN TRANSFORMASIONAL DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013 Dr. Sar Joni Herri, M.Pd.....	187

MEMBINGKAI KE-*BHINNEKA TUNGGAL IKA*-AN DALAM PERSPEKTIF MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd

Dosen Program Studi PPKn FKIP UAD. *E-mail*: dik2baehaqi@yahoo.com

A. Pendahuluan

Secara empirik, masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat yang majemuk (*plural society*). Dalam kajian Furnival (Hefner, 2007, p. 16; Nasikun, 2007, p. 33) masyarakat majemuk dipahami sebagai masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur dalam satu unit politik yang tunggal. (Hefner, 2007) memperkuat pernyataan Furnival di atas dengan menggambarkan tantangan pluralisme budaya yang dimiliki Indonesia secara lebih mencolok dan dianggap sebagai lokus klasik bagi bentukan masyarakat majemuk. Clifford Geertz (1996) sebagaimana ditulis Hardiman (2002) mengakui sulit melukiskan anatomi Indonesia secara persis. Negara ini, bukan saja multietnis (seperti Dayak, Kutai, Makasar, Bugis, Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya), tetapi juga menjadi medan pertarungan pengaruh multimental dan ideologi (seperti India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Budhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalisme, dan seterusnya). Geertz juga melukiskan Indonesia sebagai sejumlah ‘bangsa’ dengan ukuran, makna dan karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk itu, ada dua istilah yang penting dipahami yaitu kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas). Pluralitas sebagai kontraposisi dari singularitas mengindikasikan adanya suatu situasi yang terdiri dari kejamakan, dan bukan ketunggalan (Kusumohamidjojo, 2000, p. 45). Artinya, dalam “masyarakat Indonesia” dapat dijumpai berbagai subkelompok masyarakat yang tidak bisa disatukelompokkan satu dengan yang lainnya. Adanya tidak kurang dari 500 suku bangsa di Indonesia menegaskan kenyataan itu. Demikian pula halnya dengan kebudayaan mereka. Sementara heterogenitas yang merupakan kontraposisi dari homogenitas mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya (Kusumohamidjojo, 2000, p. 45). Artinya, masing-masing subkelompok masyarakat itu beserta kebudayaannya bisa sungguh-sungguh berbeda satu dari yang lainnya. Dalam tulisan ini, pluralitas dan heterogenitas akan dipakai secara bergantian sebagai kebhinnekaan.

Realitas kebhinnekaan Indonesia dilukiskan Kusumohamidjojo (2000, p. 16) dalam dua dimensi, geografis dan etnografis. *Pertama*, dimensi geografis

sebagaimana hasil pengamatan dari Alfred Wallace dan Weber yang kemudian dikukuhkan dalam Geografi sebagai Garis Wallacea yang membentang dari Laut Sulu di utara melalui selat Makasar hingga ke Selat Lombok di selatan, dan Garis Weber yang membentang dari pantai barat Pulau Halmahera di utara melalui Laut Seram hingga ke Laut Timor di selatan. Garis Wallacea dan Weber secara fisiko-geografis membedakan Dangkalan Sunda di sebelah Barat (yang meliputi pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali) dari Dangkalan Indonesia Tengah (yang meliputi pulau-pulau Sulawesi dan sebagian pulau-pulau Nusa Tenggara sebelah Barat), dan dari Dangkalan Sahul di sebelah timur (yang meliputi kepulauan Halmahera, Aru dan Papua). Perbedaan itu merupakan akibat dari proses perkembangan fisiko-geografis yang ditinggalkan oleh akhir Zaman Es. Perbedaan geografis itu berakibat menentukan pada perbedaan dunia flora dan fauna dari masing-masing kelompok kepulauan itu.

Dimensi *kedua* adalah dimensi yang etnografis, yang merupakan perpaduan konsekuensi dari dimensi fisiko-geografis dan proses migrasi bangsa-bangsa purba. Dalam kerangka dimensi etnografis itu kita dapat melihat adanya perbedaan etnis pada penduduk yang mendiami berbagai pulau-pulau Nusantara. Dari hasil penelitian yang dilakukan seorang Antropolog Junus Melalatoa (1995) yang kemudian hasil penelitian ini diterbitkan sebagai *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Melalatoa, 1995) diketahui adanya tidak kurang dari 500 suku bangsa yang mendiami wilayah negara yang kita sepakati bersama-sama bernama Indonesia ini, mereka mendiami sekitar 17.000 pulau besar dan kecil, berpenghuni atau tidak berpenghuni. Kebhinnekaan yang ada di Indonesia sebenarnya sudah *taken for granted*, bukan karena hadirnya para pendatang baru yang berlainan etnik, ras atau agama, melainkan karena sejak dulu masyarakat Indonesia memang plural sekaligus heterogen.

Dalam perspektif lain, kebhinnekaan bangsa Indonesia dapat dilihat baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, kebhinnekaan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya. Sedangkan secara horizontal, kebhinnekaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan, dan budayanya.

Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan sekaligus heterogen, tersimpan kekuatan yang sangat besar (sebagai modal sosial dan budaya) berupa beragam adat istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa yang berjenis-jenis yang menjadi pengikat kelompok-kelompok masyarakat untuk bersatu menentang penjajahan. Sifat kebhinnekaan Indonesia justru lebih memperkuat keinginan untuk bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. Oleh karena itu kebhinnekaan masyarakat Indonesia perlu dilihat sebagai sesuatu yang cair dengan tujuan adil, makmur dan bermartabat bagi tiap warga negara. Cair dalam arti bahwa ada kebutuhan situasional dan kontekstual yang perlu

diperbaharui dan/atau direvisi dari waktu ke waktu atau perubahan waktu (Arif, 2008).

Hal di atas relevan dengan pernyataan Benedict Anderson (Anderson, 2002) yang dengan tepat melihat kekuatan pengikat tersebut sebagai adanya suatu keinginan untuk membentuk komunitas-komunitas terbangayng (*imagined communities*). Dikatakan sebagai *imagined communities* karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan tidak kenal sebagian besar anggota lainnya, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Semuanya menjadi konsep komunitas politik ketika ditiupkan konsep sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka yang pada saat yang sama komunitas itu berubah menjadi sesuatu yang terbangayng berada dalam bangunan bayang-bayang citra sebagai komunitas politik dan ingin menyatukan semua yang berada dalam batas-batas kesamaan itu (Dhakidae, 2002). Dalam arti itu, bangsa Indonesia adalah proyeksi ke depan dan sekaligus ke belakang. Karena itu tidak pernah dikatakan bangsa itu “lahir” melainkan ia “hadir” dalam formasi sebagai suatu *historical being* sebagaimana dikatakan komunitas-komunitas terbangayng yang didasarkan pada berbagai faktor bahasa, etnisitas, adat-istiadat, memori dan sejarah orang-orang yang tinggal di kepulauan Nusantara yang beranekaragam.

Selain memberikan *side effect* (dampak) positif sebagaimana diuraikan di atas, dalam masyarakat Indonesia yang plural dan heterogen, tersimpan dampak negatif, sebab karena faktor kebhinnekaan itulah justru sering memicu timbulnya konflik antarkelompok masyarakat. Konflik-konflik antarkelompok masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial (*social disharmony*).

Realitas masyarakat Indonesia yang plural dan heterogen dapat diilustrasikan sebagai sebuah mozaik dimana keutuhan dan keserasiannya ditopang oleh perbedaan unsur-unsurnya yang berasal dari keanekaragaman yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dibentuk dari pertemuan berbagai macam warna dari kelompok masyarakat pendukungnya.

B. Nilai Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam Mata Pelajaran PPKn

Upaya membimbing masyarakat Indonesia yang berbhinneka tidak bisa *taken for granted* atau *trial and error* (Azra, 2006, p. 153), tetapi sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan. H.A.R Tilaar mengemukakan bahwa suatu masyarakat yang pluralistis dan multikultural tidak mungkin dibangun tanpa adanya manusia yang cerdas dan bermoral (Tilaar, 2004, p. 100). Selain berperan untuk meningkatkan mutu bangsa agar dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain, pendidikan juga berperan memberi perekat berbagai perbedaan di antara komunitas kultural atau kelompok masyarakat

yang memiliki latar belakang budaya berbeda agar komitmen dalam berbangsa dan bernegara semakin meningkat.

Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia. Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, sekalipun dalam masyarakat yang masih terbelakang (*primitif*). Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang.

Pada bulan Oktober 1994 di Jenewa, UNESCO merekomendasikan empat pesan dalam pendidikan. *Pertama*, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. *Kedua*, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Karena itu, *keempat*, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri diri pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.

Dalam kerangka itu, posisi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai program kurikuler di sekolah memiliki peran penting dalam mendukung rekomendasi UNESCO tersebut. Dalam penjelasan huruf b Pasal 77I dan 77J PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembacaan kita tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam mata pelajaran PKn/PPKn tingkat SMP/MTs dan SMA/MA dapat ditelusuri dalam dua kurikulum, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dan dalam Kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Ada beberapa konsep yang menjadi nilai inti pesan kebhinnekaan dalam mata Apabila kita cermati Standar Kompetensi dan Kompetensi Standar di atas, baik dalam KTSP maupun dalam Kurikulum 2013, ada beberapa konsep yang menjadi nilai inti pesan kebhinnekaapelajaran PKn/PPKn. Konsep itu adalah: keberagaman etnis dan ras, agama, budaya, gender, dan toleransi.

1. Kelompok Etnis dan Ras

Perkataan etnis berasal dari kata *ethnos* yang dalam bahasa Yunani berarti "masyarakat". Etnis adalah golongan masyarakat yang didefinisikan secara sosial berdasarkan berbagai macam karakteristik kulturalnya. Artinya, karakteristik-karakteristik kultural ini dapat berupa bahasa, agama, asal suku atau asal negara, tata cara hidup sehari-hari, makanan pokok, cara berpakaian atau ciri-ciri kultural yang lainnya. Etnis terbentuk berdasarkan definisi sosial dan bukan merupakan definisi yang didasarkan pada faktor keturunan atau biologis.

2. Membangun Keberagaman Inklusif

Pengertian dasar tentang agama dapat dikemukakan baik dari agama itu sendiri, dari para Antropolog maupun dari para sarjana dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Menurut agama-agama *samawi* atau agama monoteistik, adalah sebuah pengakuan terhadap adanya Tuhan dan sebagai wadah untuk penyerahan diri terhadap-Nya.

Indonesia mengakui keberagaman agama, masing-masing adalah agama Islam, kristen, Katolikt, Hindu, Budha, Konghucu. Keenam agama itu sering disebut agama resmi, karena perhatian besar negara terhadap agama-agama tersebut. Walaupun demikian, sebenarnya terdapat agama-agama atau kepercayaan lain yang dianut oleh masyarakat bangsa Indonesia, terutama oleh kelompok-kelompok minoritas masyarakat lokal atau masyarakat adat tertentu.

Permasalahan yang muncul dari realitas keberagaman ini adalah konflik keberagaman, baik di dalam satu agama, atau pun antar agama. Salah satu faktor utama konflik keagamaan adalah adanya paradigma keberagaman masyarakat yang masih eksklusif (Yaqin, 2005, p.56). Pemahaman keberagaman ini membentuk pribadi yang antipati terhadap pemeluk agama lainnya. Pribadi yang tertutup dan menutup ruang dialog dengan pemeluk agama lainnya. Pribadi yang selalu merasa hanya agama dan alirannya saja yang paling benar sedangkan agama dan aliran keagamaan lainnya adalah salah dan bahkan dianggap sesat.

Karena itu, perlu dibangun pemahaman keberagaman yang lebih inklusif-pluralis, multikultural, humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, substantif, dan aktif sosial (Yaqin, 2005, pp. 56-57). Pemahaman keberagaman seperti itu dapat dibangun melalui pendidikan, media massa, maupun melalui interaksi sosial yang intens.

Keberagaman yang inklusif-pluralis berarti dapat menerima pendapat dan pemahaman agama lain yang memiliki basis ketuhanan dan kemanusiaan. Pemahaman keberagaman yang multikultural berarti menerima adanya keragaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan. Pemahaman yang humanis adalah mengakui pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama, artinya seseorang yang beragama harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi orang lain, peduli terhadap orang lain dan berusaha membangun perdamaian dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Paradigma dialogis-persuasif berarti lebih mengedepankan dialog dan cara-cara damai dalam melihat perselisihan dan perbedaan pemahaman keagamaan daripada melakukan tindakan-tindakan fisik. Paradigma kontekstual berarti menerapkan cara berfikir kritis dalam memahami teks-teks keagamaan, artinya meskipun ada teks-teks keagamaan yang tidak bisa diganggu gugat akan tetapi tidak sedikit dari teks-teks keagamaan tersebut yang membutuhkan interpretasi-interpretasi kritis dalam upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan keagamaan terkini. Sedangkan paradigma keagamaan yang substansif berarti lebih mementingkan dan menerapkan nilai-nilai agama daripada hanya melihat dan mengagungkan simbol-simbol keagamaan. Paradigma pemahaman keagamaan aktif sosial berarti agama tidak hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan rohani secara pribadi saja. Akan tetapi yang terpenting adalah membangun kebersamaan dan solidaritas bagi seluruh manusia melalui aksi-aksi sosial yang nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

3. Kesadaran Budaya Multikultur

Terbentuknya komunitas bernama masyarakat adalah implikasi logis dari realisasi kemanusiaan dengan fitrahnya sebagai *homo socius* (makhluk bermasyarakat). Hubungan antar individu dengan keinginan dan tujuan yang sama pada akhirnya membentuk sebuah sistem sosial yang dinamakan masyarakat.

Dalam pandangan (Koentjaraningrat, 1990, p. 138), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kolektif dimana manusia itu bergaul dan berinteraksi. Interaksi antar individu dengan keinginan dan tujuan yang sama tersebut pada akhirnya melahirkan kebudayaan. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sementara kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Melalui kebudayaan, manusia menciptakan tatanan kehidupan yang ideal di muka bumi.

Kebudayaan mempengaruhi segenap kehidupan sosial, sehingga sering dipandang sebagai semua cara hidup atau *way of life* yang harus dipelajari dan diharapkan dan yang sama-sama harus ditaati oleh para anggota masyarakat tertentu atau para anggota dari suatu kelompok tertentu (Taneko, 1984, p. 61) Melalui budaya, setiap kelompok budaya menghasilkan jawaban-jawaban khususnya sendiri terhadap tantangan-tantangan hidup. Budaya memudahkan kehidupan dengan memberikan solusi-solusi yang telah disiapkan untuk memecahkan masalah-masalah dengan menetapkan pola-pola hubungan, dan cara-cara memelihara kohesi dan konsensus kelompok.

Sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, kebudayaan digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi. Dengan demikian pada hakikatnya, kebudayaan adalah suatu mekanisme adaptif terhadap lingkungan.

Berdasarkan pemaparan tentang makna budaya di atas, dapat dirumuskan kesimpulan bahwa budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari, dialami dan diwariskan bersama secara sosial yang melahirkan makna dan pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku para anggota suatu masyarakat.

4. Membangun Sikap Sensitifitas Gender

Harus diakui bahwa sejak lama pandangan masyarakat kita dalam melihat peran antara perempuan dan laki-laki cenderung patriarki. Kultur ini menomorsatukan laki-laki daripada perempuan, dan menyebabkan dominasi laki-laki atas perempuan. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan pensubordinasi-an perempuan dari laki-laki. Kemudian pada akhirnya akan menimbulkan dampak yang kurang baik, seperti adanya peminggiran hak-hak perempuan, pemberian citra negatif terhadap perempuan, pemberian beban berlebihan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan (Yaqin, 2005, p. 112).

Gender menurut Julia Wood T (Yaqin, 2005, p. 115) adalah peran dalam kehidupan yang biasa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Peran ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanda-tanda biolois yang dibawa manusia sejak lahir. Gender lebih cenderung mengacu pada anggapan yang berlaku dalam masyarakat tentang aktifitas-aktifitas dan sikap-sikap (sifat dan perilaku) yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Gender adalah bagian dari sebuah konstruksi sosial terhadap apa yang disebut maskulin dan feminisme. Gender tidak bisa dipisahkan dengan kultur, karena gender justru dibentuk oleh kultur. Ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial budaya masyarakat tentang gender akan berbeda-beda. Gender tentu berbeda dengan seks. Menurut L Margaret Andersen (Yaqin, 2005, p. 115) ia lebih mengacu kepada identitas genetis atau fisik seseorang. Secara biologis, seks biasanya digunakan untuk menentukan apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan membangun sikap anti diskriminasi terhadap perempuan. Guru di sekolah/dosen di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran itu. karenanya, guru/dosen perlu memiliki wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender agar ia mampu bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik. Selain itu, guru/dosen juga dituntut untuk mampu mempraktikkan tindakan dan sikap anti diskriminasi gender, dan yang terpenting, guru/dosen harus sensitive terhadap permasalahan gender di dalam maupun di luar kelas. Peran sekolah/kampus sebagai lembaga pendidikan juga tidak kalah penting dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender.

5. Membangun Toleransi

Nilai penting dari kebhinnekaan sebagai keniscayaan adalah membangun sikap toleransi. Term toleransi berasal dari bahasa Latin "*tolerantia*", yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran (Misrawi, 2007, hal. 181). Toleransi dapat dipahami sebagai sikap atau gagasan yang menggambarkan pelbagai kemungkinan. Hal tersebut menurut Michael Walzer (Misrawi, 2007), setidaknya terdapat lima hal yang dimungkinkan menjadi substansi atau hakikat toleransi. Pertama, menerima perbedaan untuk hidup damai. Kedua, menjadikan keseragaman menuju perbedaan. Artinya, membiarkan segala kelompok berbeda dan eksis dalam dunia. Tidak perlu adanya penyeragaman. Ketiga, membangun moral stoisme, yaitu menerima bahwa orang lain mempunyai hak, kendatipun dalam praktiknya kurang menarik simpati orang lain. Keempat, mengeskpresikan keterbukaan terhadap yang lain; ingin tahu; menghargai; ingin mendengarkan dan belajar dari orang lain. Kelima, dukungan yang antusias terhadap perbedaan serta menekankan aspek otonomi.

Lembaga Ketahanan Nasional RI merumuskan toleransi sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, berfungsi secara dua arah yakni mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dan tidak merusak pegangan agama masing-masing dalam ruang lingkup yang telah disepakati bersama. (Lemhannas RI, 2011, p. 36).

Sebagai salah satu upaya mewujudkan kehidupan global yang toleran, UNESCO telah mengeluarkan deklarasi toleransi. Menurut UNESCO, toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Toleransi tersebut harus didukung oleh pengetahuan yang luas, sikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir dan beragama. Toleransi juga berarti sebuah sikap positif dengan cara menghargai hak orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan asasnya sebagai manusia.

Secara sosiologis, membangun masyarakat yang toleran tidak semudah membalikkan kedua belah tangan, karena sejarah manusia pada hakikatnya adalah sejarah intoleransi (Misrawi, 2007, hal. 178). Karena itu, membangun toleransi harus menjadi prioritas, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan heterogen. Pemahaman atas pentingnya toleransi mesti menjadi keniscayaan dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik. Hanya dengan cara itu, kehidupan ini akan lebih bermakna dan bermanfaat.

Zuhairi Misrawi merumuskan dua model toleransi. Pertama, model toleransi pasif. Dalam toleransi ini, yang menonjol adalah sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Sebab setiap manusia berbeda, baik dari segi pemikiran maupun tindakan, maka tidak ada pilihan lain kecuali setiap kelompok bersikap toleran terhadap kelompok yang lain. Model yang pertama ini biasanya dikenal dengan sikap inklusif. Kedua, model toleransi aktif. Dalam toleransi aktif ada kemajuan dari sekadar toleransi pasif. Sikap aktif ditunjukkan untuk melibatkan diri pada apa yang lain di tengah perbedaan dan keragaman. Memang antara manusia yang satu dengan yang lain berbeda, tetapi tidak menutup adanya partisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Toleransi keniscayaan adanya dialog dan kesepahaman yang setara antara “subjek” dan “objek”. Di antara keduanya tidak ada yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh pihak yang lain.

Mengacu pada dua model di atas, pilihan yang harus dilakukan adalah mengubah paradigma toleransi yang pasif menjadi toleransi yang aktif yang bisa diterapkan dalam konteks sosial yang majemuk. Membangun toleransi yang aktif secara praksis dapat diimplementasikan dalam bentuk dialog antar masyarakat yang beranekaragam, diimplementasikan dalam bentuk pendidikan, kajian interreligius, dan dalam bentuk kegiatan seni budaya (Lemhannas RI, 2011).

C. Mengelola Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an

Para pendiri negara (*founding fathers*) yang memahami betul konstelasi masyarakat Indonesia yang plural dan sekaligus juga heterogen telah menjadikan ujar-ujar *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan bagi Negara Republik Indonesia (Kusumohamidjojo, 2000, pp. 1, 45), bahkan setelah proses perubahan UUD 1945, ujar-ujar *Bhinneka Tunggal Ika* itu semakin dikukuhkan sebagai semboyan bangsa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 36A UUD 1945 yang berbunyi *Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika***. Semboyan ini memuat idealitas multikulturalisme di Indonesia (Hardiman, 2002).

Sebagai suatu *historical being*, *Bhinneka Tunggal Ika* yang secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu atau *although in pieces yet one*, melewati rentang yang panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mulai pada zaman negara kerajaan Nusantara. Kalimat itu sendiri

diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit juga sudah dipakai sebagai motto pemersatu Nusantara, yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada dalam Kakawin Sutasoma, karya Empu Tantular:

*Rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa,
bhinnēki rakwa ring apan kēna parwanosēn,
mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
bhinnēka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa* (Pupuh 139: 5).

(Konon dikatakan bahwa Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua. (*Bhineka Tunggal ika tan Hana Dharma Mangrwa*) (Tantular, 2009, pp. 504-505).

Tentang hal ini amatlah menarik menyimak apa yang dikemukakan oleh Dadang Supardan yang mengutip uraian Darmodihardjo (1985), yang menyatakan bahwa *Bhinneka Tunggal Ika* secara hakiki mengungkapkan kebenaran historis yang tidak dapat disangkal lagi sejak zaman kerajaan dahulu (Supardan, 2008). Kerajaan Majapahit memiliki politik hubungan antarkerajaan yang terungkap dalam semboyan “*mitreka satata*” yang berarti “persahabatan dengan dasar saling menghormati” dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara lainnya seperti Champa, Syam, Burma. Pujangga Empu Tantular melukiskan kehidupan beragama dengan baik dengan kalimat “*bhinneka tunggal ika tan hana darma mangrua*” yang berarti “walaupun berbeda, satu adanya, tidak ada agama yang tujuannya berbeda”. Empu Tantular sudah mendudukan ujar-ujar tersebut sebagai falsafah Kerajaan Majapahit pada zamannya (abad ke-14).

Uraian di atas memperjelas pernyataan Gonggong (2000) yang menyatakan perkembangan masyarakat yang kini menyebut dirinya dengan Indonesia itu melalui suatu jarak waktu yang panjang, yaitu dimulai ketika masyarakat itu masih bertegak dan hidup dalam “negara” atau kerajaan-kerajaan Nusantara. Atau gambaran yang diberikan oleh Clifford Geertz (2000), antropolog kondang yang dianggap sebagai ahli Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Gonggong (2000) berikut:

Ketika kita menyaksikan panorama Indonesia saat ini, rasanya kita sedang menyusun suatu sinopsis masa lalu yang tanpa batas, seperti kalau kita melihat benda-benda peninggalan sejarah (artefak) dari bermacam-macam lapisan dalam situs arkeologis yang lama mengering, yang dijabarkan di atas sebuah meja sehingga sekali pandang bisa kita lihat kilasan sejarah manusia sepanjang ribuan tahun. Semua arus kultural yang sepanjang tiga millennia, mengalir berurutan, memasuki Nusantara dari India, dari Cina, dari Timur Tengah, dari Eropa – terwakili di tempat-tempat tertentu: di Bali yang Hindu, di permukiman

Cina di Jakarta, Semarang atau Surabaya, di pusat-pusat Muslim di Aceh, Makasar atau Dataran Tinggi Padang; di daerah-daerah Minahasa dan Ambon yang Calvinis, atau daerah-daerah Flores dan Timor yang Katolik.

Lebih lanjut, Geertz Gonggong (2000) menunjukkan fakta tentang situasi masyarakat Indonesia, sebagai berikut:

Rentang struktur sosialnya juga lebar, dan merangkum: sistem-sistem kekuasaan Melayu-Polynesia di pedalaman Kalimantan atau Sulawesi, desa-desa tradisional di dataran rendah di sepanjang sungai Jawa Tengah dan Jawa Timur; desa-desa nelayan dan penyelundupan yang berorientasi pasar di pantai-pantai Kalimantan dan Sulawesi; ibu-ibu kota provinsi yang kumuh dan kota-kota kecil di Jawa dan pulau-pulau seberang; dan kota-kota metropolitan yang besar, terasing, dan setengah modern seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan Makasar. Keanekaragaman bentuk perekonomian sistem-sistem stratifikasi, atau aturan kekerabatan juga melimpah ruah.

Apa yang diterangkan di atas barulah hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan yang dilatari oleh perjalanan sejarah yang panjang. Dilihat dari segi agama, keyakinan, budaya, dan suku bangsa, Indonesia adalah satu contoh negara yang paling beragam. Dalam masyarakat yang plural dan heterogen ini, konsep *Bhinneka Tunggal Ika* mensyaratkan *united and unifed diversities*, tetapi tidak mungkin memberi tempat kepada *uniformed diversities*. Namun demikian, masalahnya adalah, pemenuhan syarat itu memprasyaratkan kemauan politik (*political will*) untuk memahami implikasi dari *Bhinneka Tunggal Ika* itu dalam konteks kebudayaan yang menjadi semakin canggih dalam suatu proses sosial yang kompleks. Kebhinnekaan dalam masyarakat, apalagi yang semakin melebar sebagai akibat dari industrialisasi dan informatisasi akan semakin melonggarkan ikatan-ikatan kekeluargaan, ruang hidup, asal usul sosial dan tradisi, untuk pada gilirannya kemudian menggulirkan perubahan struktur dalam keutuhan masyarakat. Meskipun demikian, kita tidak mempunyai pilihan lain. Dengan Proklamasi yang mendirikan Republik Indonesia kita sudah menyatakan diri sebagai suatu bangsa, bahkan sebagai bangsa yang besar. Dengan demikian, tantangan bagi masyarakat Indonesia adalah untuk membuktikan, bahwa kita sungguh-sungguh merupakan bangsa yang besar. Kegagalan untuk membuktikannya hanya akan membuat mimpi buruk disintegrasi menjadi kenyataan yang sukar untuk dipikul.

Semangat persatuan dan kesatuan dalam keragaman sebagai cita-cita terbayangkan bangsa Indonesia dalam perjalanannya tidak selalu menunjukkan kesesuaian antara wacana dan praktik. Pada tataran praksis masih terjadi pertarungan antara nilai-nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks alam,

politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan agama serta kualitas psiko-sosial para penyelenggara negara. Memang harus diakui bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang bersifat multikultural itu sampai saat ini masih belum mencapai tarap yang membanggakan dan membahagiakan. Misalnya, kita masih menyaksikan berkembangnya fenomena kasuistis dari etnosentrisme dan primordialisme lain yang menyertai desentralisasi dan otonomi daerah, yang diwarnai konflik horizontal antar suku, agama, ras dan golongan yang terjadi di berbagai penjuru tanah air, terutama pada saat terjadinya proses politik pemilihan umum.

Pengalaman sejarah bangsa telah menunjukkan bahwa sejak masa Orde Lama dan Orde Baru, terdapat kecenderungan kuat untuk melaksanakan politik keseragaman budaya (*monokulturalisme*) yang pada gilirannya justru menghancurkan budaya lokal yang asli (*local cultural genius*). Padahal tradisi sosio-kultural lokal itu merupakan kekayaan yang tidak ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri tetapi bagi masyarakat-masyarakat lain. Tradisi lokal ini juga merupakan *defense mechanism* dan sekaligus *early warning system* yang dapat memelihara integrasi dan keutuhan soso-kultural masyarakat bersangkutan.

Sebagai contoh, politik penyeragaman tergambar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang selama ini bercorak “monokulturalisme”, serba penyeragaman demi stabilitas dan integrasi bangsa. Pemaksaan ini menjadi bagian dari pemicu munculnya berbagai konflik sosial di beberapa daerah yang sekaligus telah menegasikan semangat persatuan dan kesatuan dalam keragaman yang disinyalir akibat masyarakat tercerabut dari nilai-nilai lokal mereka yang genuin.

Oleh karena itu, mengingat kenyataan kebhinnekaan Indonesia, negara ini hanya bisa bertahan dalam persatuan jika segenap warga dan pemerintahnya memberikan tempat yang pantas pada keanekaragaman tersebut sambil menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang menghormati kemandirian daerah tetapi juga mengedepankan solidaritas untuk memajukan daerah-daerah yang kurang beruntung dalam sumber daya alam dan kelompok-kelompok masyarakat yang terasing jauh dari pusat maupun jalur pembuatan keputusan politik maupun lalu lintas transportasi dan komunikasi.

Untuk menghadapi realitas kebhinnekaan tersebut, diperlukan politik *Bhinneka Tunggal Ika*, yaitu politik pembelaan bagi seluruh warga bangsa yang terkait dengan hak-hak mereka untuk berbudaya, beragama, dan berpolitik agar setiap warga merasa mantap dan nyaman menjadi bagian dari bangsa Indonesia (Sutarto, 2011, p. 50). Politik *Bhinneka Tunggal Ika* adalah politik penguatan berbagai elemen bangsa yang berlatar belakang etnik, budaya, agama, dan golongan yang berbeda, yang bertujuan untuk meneguhkan NKRI. Politik *Bhinneka Tunggal Ika* memberi peluang dan akses yang sama kepada setiap warga bangsa, tidak pandang latar belakang etnik, agama, ras,

dan golongan, asalkan yang bersangkutan memiliki komitmen untuk mengokohkan bangunan politik yang bernama NKRI. Politik *Bhinneka Tunggal Ika* adalah politik pemberdayaan seluruh warga bangsa, agar mereka merasa menjadi bagian penting dari NKRI dan merasa memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Politik *Bhinneka Tunggal Ika* adalah pemanfaatan secara strategis produk-produk budaya Indonesia, baik yang *tangibles* “bendawi” maupun *intangibles* “nonbendawi” untuk mengatasi berbagai masalah yang membelit bangsa, baik masalah yang bernuansa politis, ekonomi, maupun kebudayaan.

Dalam konteks pendidikan, politik *Bhinneka Tunggal Ika* dapat dibelajarkan kepada setiap peserta didik guna mengarahkan mereka untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis maupun agama. Politik *Bhinneka Tunggal Ika* ini lebih luas dimaksudkan bahwa kita hendaknya apresiatif terhadap budaya orang lain, perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan dan khazanah bangsa kita. Dengan pandangan tersebut, diharapkan sikap eksklusif yang selama ini bersemayam dalam otak kita dan sikap membenarkan pandangan sendiri (*truth claim*) dengan menyalahkan pandangan dan pilihan orang lain dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

D. Penutup

Pemahaman tentang nilai-nilai ke-*bhinneka tunggal ika*-an menjadi keniscayaan yang harus dimiliki oleh masyarakat bangsa Indonesia. Sebab di atas nilai-nilai itulah kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dapat hidup berdampingan secara damai. Membangun pemahaman tentang ke-*bhinneka tunggal ika*-an tidak cukup hanya dibelajarkan secara konseptual di ruang-ruang kelas yang formal, tetapi lebih dari itu, secara praksis sikap saling menghormati, saling menerima dan saling menghargai di tengah keberagaman harus menjadi kebiasaan yang dipraktikkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

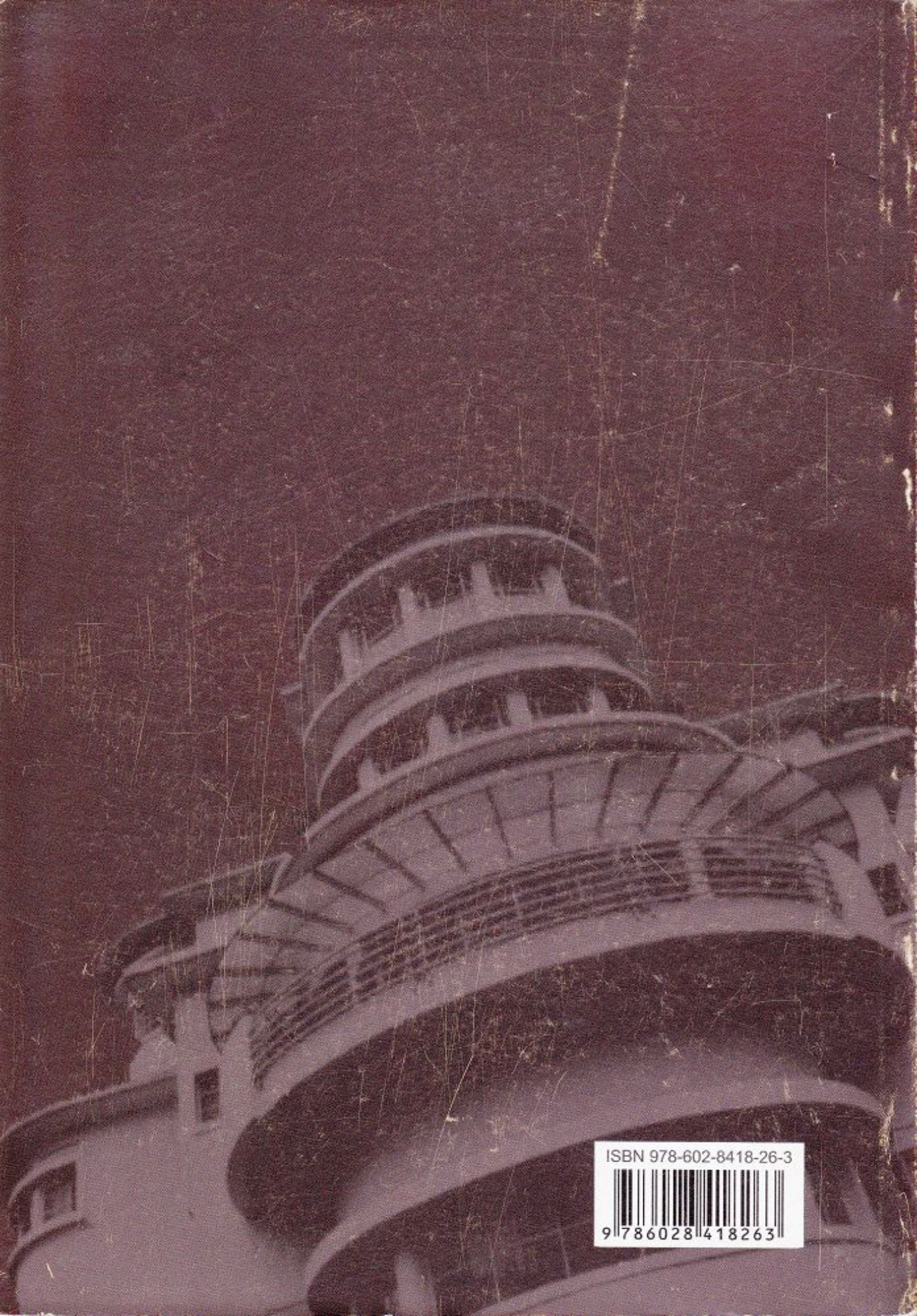
Dalam konteks psiko-pedagogis, mata pelajaran PPKn di sekolah, telah memasukkan ke-*bhinneka tunggal ika*-an sebagai salah satu kajian penting yang harus dipelajari siswa. Hal itu dimaksudkan sebagai salah satu upaya membentuk peserta didik yang memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, peran guru PPKn menjadi tidak terelakan dalam proses membelajarkan nilai-nilai ke-*bhinneka tunggal ika*-an itu dengan baik.

E. Bibliography

Anderson, B. (2002). *Imagined Communities (Komunitas-komunitas Terbayang)*. Yogyakarta: Kerjasama Insist dan Pustaka Pelajar.

- Arif, D. B. (2008, Oktober). Kompetensi Kewarganegaraan untuk Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia. *Acta Civicus*, 1(3).
- Arif, D. B. (2008). *Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap Kompetensi Kewarganegaraan*. Universitas Pendidikan Indonesia, Sekolah Pascasarjana. Bandung: SPs UPI.
- Arif, D. B. (2011). “Politik Bhinneka Tunggal Ika” untuk Mengelola Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Kongres Asosiasi PKn Se-Indonesia* (pp. 7080). Bandung: Jurusan PKn UPI.
- Azra, A. (2006). Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme. *Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila "Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: Brighten Institute.
- Dhakidae, D. (2002). Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-komunitas Terbayang: Pengantar. In *Benedict Anderson*. Yogyakarta: Kerjasama Insist dan Pustaka Pelajar.
- Gonggong, A. (2000). Hidup dan Sejahtera Bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika: Pengantar untuk Memahami Diri. In B. Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan* (pp. ix-xix). Jakarta: Grasindo.
- Hardiman, F. B. (2002). Pengantar. In W. Kymlicka, *Kewargaan Multikultur: Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas* (E. A. Eddin, Trans.). Jakarta: LP3ES.
- Harsojo. (1988). *Pengantar Antropologi*. Bandung: Binacipta.
- Hefner, R. W. (2007). *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. (B. Hidayat, Trans.) Yogyakarta: Kanisius.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1996). *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Koentjaraningrat. (1990). *Sejarah Antropologi II*. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Lemhannas RI. (2011). *Materi dan Modul Nilai-nilai Kebhinnekaan dan Multikulturalisme*. Jakarta: Direktorat Pemantapan Transformasi Nilai-nilai Universal Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.
- Melalatoa, J. (1995). *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.

- Misrawi, Z. (2007). *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah.
- Nasikun. (2007). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemardjan, S., & Soemardi, S. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Supardan, D. (2008, Mei-Agustus). Peluang Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultur: Perspektif Pendidikan Kritis. *Alumni*, 1(2), 128-151.
- Sutarto, A. (2011). Pancasila Sebuah Pilihan Puncak dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Kongres Pancasila III "Harapan, Peluang, Tantangan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila"*. Surabaya: MPR RI, Unair dan UGM.
- Taneke, S. B. (1984). *Hukum Adat*. Bandung: Eresco.
- Tantular, M. (2009). *Kakawin Sutasoma*.
- Tasmara, T. (2002). *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yaqin, M. A. (2005). *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.



ISBN 978-602-8418-26-3



9 786028 418263